

PERANAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MENENGAH AMANAH UMMAH SURABAYA

Oleh Hardianto Ritonga
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
Email: hardinatoritonga@gmail.com

Abstract

Baitul Maal Wat Tamwil's existence is the best and most strategic and functional approach to empowering small and medium businesses, Baitul Maal Wat Tamwil is relatively more agile and flexible because it is more with street vendors or middle-low society. Through Baitul Maal Wat Tamwil, the poor and small traders will be released from the bondage of the usury system (interest) and transfer it to the Islamic economic system with a profit sharing system. Departing from these problems, this research aims to find out how the role of Baitul Maal Wa Tamwil Amanah Ummah to develop micro businesses. This study uses a qualitative method by analyzing cases. From this research describe as a whole as well as systematically about the role of Baitul Maal Wat Tamwil in the framework of empowering micro businesses.

Kata Kunci : Baitul Maal, Usaha Mikro, UKM

A. Pendahuluan

Mencermati kondisi perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu merupakan bagian dari putaran pusaran kencangnya ekonomi dunia, layaknya melihat perjalanan sebuah biduk sampan di tengah samudera; berbagai liku dan liuk “gelombang” menghadang, menerjang bahkan sampai memporak-porandakan “pertahanan”nya. Sejarah mencatat keberhasilan program pemerintah membangun ekonomi Indonesia yang pro-rakyat pada masa orde baru dengan program rencana pembangunan lima

tahunnya (Repelita) dengan gandengan Program Jangka Pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang cukup berhasil menggeliatkan perekonomian bangsa Indonesia pada masa itu terutama sektor ekonomi kecil menengah.¹ Alhasil, presiden Soeharto pada masanya menjabat, dijuluki sebagai Bapak Pembangunan, hal ini berdampak berduyun-duyunnya negara asing di kawasan Asia dan benua Afrika yang sama-sama sedang berkembang datang ke Indonesia dalam rangka study-

¹ Mubyarto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial*, (Yogyakarta, Aditya Media, 1995), hal. 122.

banding keberhasilan perekonomian Indonesia.²

Kondisi demikian paling tidak dapat bertahan dan dirasakan sampai penghujung tahun 90-an, yakni dengan adanya krisis keuangan global, populer dengan istilah krisis moneter, yang berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia nilai tukar rupiah anjlok, harga-harga barang meroket, PHK menjamur dimana-mana. Setali tiga uang, kondisi perekonomian pada masa itu diperparah eskalasi politik negara yang tidak stabil, sehingga berdampak munculnya krisis sosial yang cukup parah; kerusuhan terjadi di beberapa tempat, penjarahan menjamur dan tindakan-tindakan anarkis lainnya pun seolah menular ke berbagai sektor.

Dahsyatnya krisis moneter pada saat itu memporak-porandakan beberapa sektor perekonomian terutama sektor perbankan dan bursa saham. Di sisi lain terdapat sektor ekonomi yang ikut terkena imbas krisis moneter, yakni sektor ekonomi mikro, kecil dan menengah. Tidak berarti dengan adanya krisis moneter pada kisaran tahun 1997-1998 menghilangkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Sektor ini tetap ada meski dirundung berbagai persoalan. Geliat usaha Mikro, kecil dan menengah inilah

yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan pada saat itu sampai sekarang.

Berbagai upaya untuk memperkuat sektor ini terus dilakukan, baik oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan, pihak swasta (lembaga keuangan perbankan) yang cukup perhatian terhadap sektor ini, ataupun masyarakat secara langsung yang menjadi motor penggerak dengan terus menjamurnya lumbung-lumbung usaha. Hal ini disokong pula dengan adanya pergeseran cara pandang (*mindset*) sebagian masyarakat pasca terjadi krisis moneter, dari semula sebagai pegawai atau karyawan menjadi seorang wirausahawan (*entrepreneur*).

Posisi pihak swasta seperti halnya Lembaga Keuangan mempunyai peran strategis dalam membantu maju dan berkembangnya sektor ekonomi masyarakat kecil dan menengah ini, apalagi kolaborasi Lembaga Keuangan dengan operasional dengan prinsip ekonomi syariah yang sudah teruji ampuh dan lebih resisten pada masa krisis moneter, sehingga pada waktunya akan cukup mampu menjawab sebageian kalangan yang meragukan optimalnya pemberdayaan perekonomian kecil dan menengah.³

² Amin Aziz, "Pedoman Pengelolaan BMT", (Jakarta: PINBUK, 2004). hal, 5.

³Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 12

Dari perjalanan yang amat panjang tersebut, melahirkan sistem berekonomi yang dilandasi nilai-nilai pemberdayaan dan pembangunan masyarakat khususnya kelas menengah dan bawah yaitu Konsep Ekonomi Kerakyatan. Pada umumnya, sistem ekonomi kerakyatan ini bertumpuh memperbaiki nasib masyarakat pedesaan. Konsep ini mengadakan perubahan penting ke arah kemajuan, khususnya ke arah pendobrakkan ikatan serta halangan yang membelenggu sebagian besar rakyat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan dan keterbelakangan.⁴

Salah satu implikasi dari Konsep Ekonomi Kerakyatan adalah munculnya unit-unit usaha kecil yang bernama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM. Di negara-negara berkembang pada umumnya, dan Indonesia pada khususnya, UMKM merupakan salah satu pemain ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan meningkatkan distribusi pendapatan secara merata. Selain itu, UMKM juga memiliki peranan yang cukup strategis dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di akar rumput yang sulit untuk masuk ke sektor-sektor formal. UMKM ini merupakan usaha yang akurat dalam rangka memperluas lapangan kerja

guna menyediakan layanan baik kepada masyarakat, juga dapat meratakan serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Tidak hanya itu, tetapi juga menakselerasikan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan stabilitas nasional serta setabilitas ekonomi tentunya.

UKM ini juga, berkontribusi terhadap melahirkan produk-produk nasional, meningkatkan ekspor, memperluas lapangan kerja, dan meratakan pendapatan penduduk. Eksistensi UKM ini juga tidak dapat dikesampingkan dalam menumbuh kembangkan ekonomi nasional, sebab UKM adalah nadi kehidupan ekonomi kebanyakan masyarakat Indonesia. Untuk mengembangkan ekonomi nasional sub sektor industri mikro kecil dan menengah ini akrab disebut Usaha Kecil Menengah (UKM) yang saat ini sangat mendapat perhatian pemerintah dalam rangka meningkatkan ekonomi nasional.

Sektor industri baik skala besar maupun skala mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu sector yang turut memberikan kontribusi (*contributor*) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, oleh karena itu kebijakan pembinaan dan pengembangan (*Development Policy*) terhadap masing-masing sub-sektor dilakukan secara berkesinambungan dan program pembinaan senantiasa

⁴ Sarbini Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 161.

dikembangkan sesuai dengan karakter dan permasalahan yang dihadapi.⁷

Mengingat besarnya potensi UMKM yang ditunjukkannya dari tahun ke tahun, oleh karena itu, pemberdayaan UMKM menjadi semakin strategis untuk meningkatkan produktivitas, lowongan kerja, terutama meningkatkan pendapatan masyarakat yang kurang mampu. Dalam perkembangannya UMKM masih memiliki berbagai persoalan, persoalan UMKM saat ini sangat berat karena ketatnya persaingan, apalagi dengan masuknya produk-produk luar negeri.⁵

Selain itu UMKM sendiri menghadapi berbagai masalah yang belum terselesaikan yang berhubungan dengan iklim usaha. Selain itu, persoalan terbesar UMKM adalah kesulitan mengakses permodalan, pengelolaan usaha yang masih tradisonal, kualitas SDM yang belum memadai, serta skala dan teknik produksi yang masih rendah.⁶ Oleh karena itu, untuk mengembangkan dan memberdayakan UMKM, diperlukan lembaga keuangan yang sesuai dengan

kebutuhan dan kondisi pelaku ekonomi rakyat itu sendiri.⁷

Pengembangan usaha mikro memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut, maka menurut konseptual bahwa pemberdayaan seperti ini merupakan usaha peningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang kurang mampu terlepas dari kungkungan *keterbelakangan* (kemiskinan). Langkah-langka pemberdayaan ini, menekankan dalam rangkai memberikan kemampuan atau kekuatan dalam meraungi kehidupan.⁸ Tujuan pemberdayaan ini tertuju kepada pengusaha, dengan membekali mereka akan motivasi dengan kata lain bahwa motivasi tersebut ditujukan kepada individu pengusaha sendiri dengan membekali mereka tentang keterampilan lewat pelatihan untuk memulai dan mengelola usahanya semaksimal mungkin.

Atas dasar inilah, BMT yang merupakan kependekan dari *Baitul Maal*

⁵ Edy Suandi Hamid dan Y. Sri Susilo, *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa*, Yogyakarta, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni 2011, hal. 46.

⁶ Ramdhansyah, *Pengembangan Model Pendanaan Umkm Berdasarkan Persepsi Umkm*, Jurnal Keuangan dan Bisni, Vol. 5, No. 1, Maret 2013, hal. 30

⁷ Wisber Wiryanto, *Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Banjarbaru dalam Rangka Millenium Development goals 2015*, Makalah (sub tema MDGs dan Pemberdayaan SME) dalam rangka Seminar Nasional Demokrasi dan Masyarakat Madani, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka pada 13 Juli 2012.

⁸ Bachtiar Rifa'i, *Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 1, Nomor 1, Januari 2013, hal. 132

Wa Baitul Tanwil yang merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis Syari'ah muncul menawarkan solusi kepada rakyat kelas bawah,. Secara lughowi atau harpiyah Baitul Maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha, masing-masing kata-kata ini memiliki arti yang berbeda serta dampak yang berbeda pula. Baitul Maal dengan segala konsekuensinya merupakan lembaga sosial berdampak pada tidak adanya profit atau keuntungan duniawi atau material di dalamnya, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang berjalan sesuai prinsip bisnis yang efektif dan efisien.⁹

Lembagaan BMT sangat diapresiasi dan didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yaitu lembaga yang sangat primer sebab mengemban bisnis yang lebih luas yaitu melahirkan usaha-usaha kecil, praktek PINBUK sudah banyak melahirkan usaha-usaha kecil termasuk BMT yang didirikan lengkap dengan badan hukum Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Adapun mekanisme kerja BMT sama dengan BPR Syariah dengan ruang lingkup dan produk

yang dihasilkan berbeda.¹⁰ Bahkan BMT sendiri adalah merupakan salah-satu model lembaga keuangan syariah yang cukup sederhana, yang secara realitas di lapangan dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Hasil pertumbuhan gemilang ini, diraih oleh BMT dari tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap jasa intermedasi keuangan, namun di sisi lain akses kedunia perbankan yang lebih formal relatif sulit dilakukan, dalam operasionalnya, BMT sangat bersentuhan langsung dengan perekonomian masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sebagaimana dijelaskan di atas adalah merupakan gambaran dari kedekatan BMT dengan sektor riil yang meminimalkan kegiatan spekulasi dalam memaksimalkan kemampuan masyarakat dalam bidang produksi dengan pembiayaan yang sudah dilakukan sesuai dengan produk-produk yang berlaku pada setiap BMT.

Tujuan berdirinya BMT, bertujuan untuk peningkatan kualitas usaha ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat terutama para anggotanya, pengertian ini dipahami mengingat bahwa BMT berorientasi pada usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggota,

⁹ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*, Cet. I (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 1

¹⁰ Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: UPFE-UMY, 2006), hal. 56.

oleh karenanya para anggota harus *empowering* (diberdayakan) agar bisa mandiri, sehingga tidak dapat dibenarkan apabila para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT, seyogianya dengan bergabungnya masyarakat menjadi anggota BMT maka meningkat pula taraf hidupnya seiring dengan meningkatnya usaha yang ditekuninya.¹¹

Kehadiran BMT Amanah Ummah ditengah-tengah masyarakat diharapkan dapat menjadi mediator antara pemilik modal dan anggotanya yang membutuhkan modal usaha, pertumbuhan BMT Amanah Ummah dari tahun ketahun terus mengalami pertumbuhan yang semakin membaik, adanya pertumbuhan yang sangat pesat menunjukkan bahwa BMT Amanah Ummah mampu menerapkan system syariah dimana masyarakat masih awam dengan adanya system syariah tersebut.

Disamping itu juga, BMT Amanah Ummah memberikan kemudahan bagi calon nasabahnya baik dalam hal simpanan maupun pembiayaan. Hal utama yang ditanamkan oleh BMT Amanah Ummah adalah gemar menabung. Selain itu proses pembiayaan juga tidak ada persyaratan yang rumit dan birokrasi yang berbelit-

belit yang dihadapi oleh anggota, sehingga tidak memberatkan para calon nasabah untuk meminjam dan mengembalikan uang pembiayaan yang dijadikan sebagai modal usaha.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi, baik berupa simpanan maupun pembiayaan yang tidak harus datang ke kantor, akan tetapi dari pihak pegawai bisa langsung mendatangi nasabah yang bertransaksi. Dilain sisi, tentu ada juga kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh BMT Amanah Ummah dalam menjalankan usahanya, keterlambatan pembayaran angsuran yang mungkin disebabkan oleh adanya penurunan omset nasabah yang melakukan pembiayaan. Beberapa individu atau lembaga lain ingin menduplikasi bahkan ingin didampingi dan dibimbing oleh BMT Amanah Ummah dalam masalah koperasi pola syariah, akan tetapi SDM yang ada sangatlah terbatas, perlu adanya kaderisasi dan percetakan SDM unggulan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam proses pemberdayaan usaha mikro, kecil menengah?, Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat program Pemberdayaan usaha Mikro, kecil menengah di Kabupaten Kota Surabaya?

¹¹ Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam*, Cet I (Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, 2003), hal. 12.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan, metode kualitatif dengan memfokuskan pada studi kasus, maka dalam penulisan ini penulis berusaha BMT supaya mengetahui seputar tentang proses pemberdayaan di BMT Amanah Ummah terhadap UMKM., sebagaimana disebutkan Robert Yin menyebutkan bahwa studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, apabila batas-batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat dengan tegas, dan multi sumberbukti pun dimanfaatkan. Studi kasus lebih sering berkuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan *how* (bagaimana) dan *why* (mengapa), serta pada tingkatan tertentu juga menjawab pertanyaan *what* (apakah), dalam kegiatan penelitian (Bungin, 2005). Dalam penelitian model lapangan ini, telah terhimpun berbagai informasi tentang kiat, upaya dan peran BMT Amanah UMMAH dalam membangun kerja sama dengan masyarakat sekitar yang mau menjadi nasabah dan berbagai persepsi mereka terhadap peran BMT Amanah UMMAH tersebut.

Suatu penelitian yang membutuhkan berbagai data dan informasi tidak terlepas dari subyek dan obyek penelitiannya. Subyek penelitian adalah sumber tempat diperolehnya data atau

keterangan yang dapat memperkuat keakuratan penelitian.¹² Sehingga para pengelola BMT Amanah UMMAH dan nasabahnya dijadikan subyek penelitian, karena mereka dipandang banyak mengetahui dan bersentuhan langsung dengan berbagai usaha operasional BMT. Adapun penelitian merupakan pokok sasaran yang akan diteliti, yaitu berbagai aktivitas yang telah dilakukan oleh BMT Amanah UMMAH.

Untuk memperkuat argumentasi penelitian, telah terhimpun data yang terkait dengan penelitian lapangan tersebut, karena hal itu menjadi salah satu cara memperkokoh argumentasi penelitian, sehingga dibutuhkan suatu metode pengumpulan data, dengan mengolah data yang telah diperoleh dari para praktisi dan nasabah BMT, untuk mendukung tingkat kualitas penelitian yang akurat dan argumentative.

C. Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Proses pemberdayaan usaha Mikro, Kecil Menengah

Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang dirancang berprinsip bagi hasil, dalam rangka menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro sebagai bentuk kepedulian terhadap

¹² Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal. 92.

kepentingan masyarakat yang kurang mampu, yang tumbuh dan berkembang dari modal awal tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan oleh sistem ekonomi yang bernafaskan keadilan. Untuk itu, BMT bukanlah lembaga yang berorientasi bisnis semata tetapi berorientasi sosial, dimana kekayaan lembaga ini dapat terdistribusi secara merata dan adil supaya BMT ini dapat benar-benar memberikan harapan kepada masyarakat maupun UMKM dalam mendapatkan pembiayaan modal usaha.

Peranan BMT sangat penting, guna memberdayakan UMKM-UMKM yang ada sebagaimana yang telah diuraikan dipembahasan yang telah lalu bahwa defenisi peran merupakan sekumpulan harapan yang dititikberatkan kepada individu-individu yang menempati kedudukan sosial tertentu atau lembaga yang mempunyai arti penting bagi struktur sosial.¹³ Adapun harapan-harapan yang dimaksud disini adalah sebagai berikut : *Pertama*, harapan-harapan yang timbul dari masyarakat terhadap pemegang peranan yaitu harapan dari masyarakat yaitu pedagang kecil yang disebut nasabah untuk mendapatkan pinjaman modal, bimbingan, dan motivasi untuk mengembangkan usahanya. *Kedua*,

harapan yang dimiliki oleh pemegang peranan terhadap masyarakat yaitu BMT sebagai pemegang peranan dalam memberikan bantuan kepada pengusaha kecil tentu memiliki harapan yaitu supaya bisa memberikan bantuan kepada mereka untuk meningkatkan usaha mereka.

Begitu halnya BMT Amanah Ummah, juga melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah, yang memberikan gambaran lembaga-lembag keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah sangat dibutuhkan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebab lembaga keuangan syariah sangat berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba kekurangan baik ilmu pengetahuan maupun materi, maka setiap BMT mempunyai tugas penting untuk mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan yang dilakukan BMT Amanah Ummah untuk meningkatkan usaha kecil dan menengah (UMKM) karena UMKM dianggap bagian yang integral dari dunia usaha secara nasional yang mempunyai kedudukan dan potensi serta peran yang sangat strategis dalam memperluas lapangan kerja, peningkatan pendapatan, membantu proses pemerataan, dimana semuanya ini akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

¹³ David Berry, Berry, David, *The Principle Of Sociologi, Terjemahan Oleh PaulusWirutomo* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003).hal. 106

Untuk itu, sangatlah perlu disosialisasikan suatu budaya kewirausahaan dan kemandirian masyarakat yang nantinya diharapkan dapat menjadi suatu kekuatan tersendiri dalam mencapai ketahanan ekonomi bangsa. Hal ini karena, pada kenyataannya usaha kecil masih mengalami berbagai kendala dan hambatan, baik internal maupun eksternal, antara lain dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, manajemen, teknologi, dan iklim usaha yang belum kondusif.

Untuk mengatasi hal tersebut diatas, terutama kaitannya dengan permodalan, maka dibutuhkan suatu bentuk kemitraan yang dapat membantu UMKM untuk lebih berkembang. Hubungan yang dilakukan biasanya dalam bentuk perjanjian tertulis yang mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan serta kewajiban masing-masing pihak, jangka waktu pengembalian modal dan penyelesaian perselisihan, yang biasanya dilakukan secara musyawarah.

Salah satu pola pemberdayaan UMKMyang dilakukan oleh BMT Amanah Ummah adalah melalui permodalan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Sofian; Bahwa peran BMT Amanah Ummah adalah memberikan permodalan kepada pelaku usaha kecil,

selain memberikan pelatihan modal adalah hal yang sangat penting untuk mereka yang tidak mampu.¹⁴ Selanjutnya, pola ini dianggap mampu melayani usaha kecil dengan skala pinjaman atau modal yang ditentukan secara efisien dan menguntungkan kedua belah pihak, baik BMT sendiri maupun peminjam.

Peranan BMT di bidang penyaluran dana kepada masyarakat dunia usaha yang bergerak di sektor ekonomi riil perlu dioptimalkan. Adapun salah satu caranya selain peningkatan kapabilitas dan profesionalitas para pengelolanya, juga diperlukan pemahaman terhadap kondisi setempat dimana sebuah BMT berada. BMT yang berada di sekitar masyarakat petani, tentu berbeda dengan BMT yang ada di sekitar masyarakat pedagang. Optimalisasi peran BMT dalam pengembangan sektor riil secara prinsip dapat dilakukan dengan mengenal motivasi dari nasabah atau calon nasabah ketika mereka mengajukan permohonan ke BMT.

Melalui peningkatan kapabilitas dan profesionalitas para pengelola BMT, serta kepekaan melakukan analisis pembiayaan sehingga dapat memberikan pembiayaan yang tepat bagi nasabah atau calon nasabah maka optimalisasi peranan BMT di sektor ekonomi riil dapat dilaksanakan dengan semestinya. BMT

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Sofian Hadi Selaku Bendahara Bmt Amanah Ummah.

yang berperan secara optimal dapat memberikan andil dalam pembangunan nasional, sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara adil dan merata.

Berdasarkan keterangan diatas, BMT dapat melakukan pemberdayaan kepada UMKM khususnya pedagang kecil atau masyarakat menengah ke bawah, yaitu dengan melakukan tiga kegiatan sebagai berikut :

1. Pembiayaan

Pedagang kecil ataupun masyarakat menengah ke bawah dalam memperoleh dana pembiayaan untuk memperluas usahanya ataupun membangun usaha baru bagi masyarakat menengah ke bawah relatif sangat sulit, maka BMT mampu menjangkanya untuk memperoleh pembiayaan yang diberikan oleh BMT tanpa menghilangkan unsur kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaannya.

2. Pembinaan

Pedagang Kecil dan masyarakat menengah ke bawah dalam melakukan usahanya dan agar mampu mempertanggungjawabkan pembiayaannya, maka BMT sering kali memberikan pembinaan kewirausahaan maupun pengelolaan keuangan. Bentuk pembinaan dapat dilakukan dengan cara

mengadakan seminar ataupun pelatihan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh penerima pembiayaan. Dalam program pembinaan ini, BMT dapat melakukan pembinaan pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat umum, hal ini akan dapat meningkatkan nilai positif bagi masyarakat umum sekaligus membangkitkan semangat berwirausaha kepada masyarakat umum. Dengan demikian program pembinaan dapat memberikan peningkatan jumlah penyaluran dana BMT dengan meningkatnya jumlah penerima pembiayaan yang telah mendapatkan pembinaan terlebih dahulu.

3. Pemasaran Produk / Jasa

Untuk membantu kelancaran usaha dari penerima pembiayaan dan menjawab kerisauan para anggota penerima pembiayaan, maka BMT dapat melakukan bantuan kepada penerima pembiayaan usaha tersebut dengan cara menghubungkan antara penjual dan pembeli bahan baku yang tergabung dalam penerima pembiayaan. Dan bahkan BMT dengan bekerja sama dengan lembaga bisnis dalam lingkup usaha besar mampu melakukan pemasaran kepada masyarakat luas terhadap hasil usaha penerima

pembiayaan.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa titik berat dari pendekatan pemberdayaan UMKM adalah penekanan tentang betapa pentingnya usaha mikro kecil dan menengah yang mandiri sebagai suatu sistem yang mendidik dan melatih diri mereka sendiri, pendekatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang seperti diharapkan mampu memberi peran bukan sebagai obyek, tetapi juga berperan sebagai subyek (pelaku pembangunan) yang ikut menentukan masa depan dan kehidupan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Kemudian apabila ditinjau dari kacamata konseptual, bahwa pemberdayaan UMKM bisa dilaksanakan dengan sistem pemberdayaan pelaku itu sendiri, sebab keberhasilan pemberdayaan tersebut sangat bergantung pada partisipasi UMKM sebagai pelaku maupun stakeholder lain yang turut serta dan berperan dalam pengembangannya. Penerapan-penerapan kebijakan untuk menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan UMKM tidak mungkin secara parsial hanya bidang ekonomi permodalan saja, namun harus juga mengarahkannya secara keseluruhan terhadap kebutuhan UMKM baik secara individu maupun kelompok

termasuk mendasarkan pada potensi sumberdaya manusianya.

Pemberdayaan UMKM ini disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan karakteristik yang telah sesuai dengan program pemberdayaan UMKM kawasan industri kecil dan menengah, sebab model pemberdayaan seperti ini sangat berguna buat karena sangat berbeda jauh dengan proses pemberdayaan yang dilakukan masyarakat. Program pemberdayaan ini harus disusun secara serius dan memfokuskannya dalam rangka upaya-upaya yang dapat membuat pelaku-pelaku UMKM lebih telaten dalam membangun komunikasi antar mereka sehingga mereka dapat saling berdiskusi secara konstruktif dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada. Sehingga, pada saat agen pengubah baik dari lembaga pemerintahan atau non pemerintah telah menuntaskan program pemberdayaan UMKM tersebut dapat terus berlangsung.

D. Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah Di Kabupaten Kota Surabaya

Sejauh ini berbagai model pemberdayaan atau pengembangan UMKM yang telah digunakan oleh berbagai pihak khususnya yang disponsori

pemerintah. Beberapa diantara model pemberdayaan UMKM yang relatife banyak di implementasikan antara lain model Grameen Bank, BMT, Inkubator, Modal Ventura dan *Community Based Development* (CBD). Setelah mengadopsi dan mengimplementasikan berbagai model pemberdayaan UMKM di Indonesia, ternyata tingkat keberhasilan yang dicapai masih belum optimal, bahkan suara-suara kegagalan tidak sedikit pula terdengar. Hal ini pula tentu disebabkan oleh berbagai hambatan dan kelemahan baik bersumber dari aspek-aspek internal model pemberdayaan UMKM maupun aspek-aspek eksternal di luar kendali pengelola kegiatan pemberdaya tersebut.

Permasalahan yang menyangkut aspek internal program pemberdayaan UMKM baik secara konsep maupun implementasinya lebih banyak pada keterbatasan kemampuan program. Keterbatasan kemampuan program meliputi keterbatasan kemampuan manajemen kelembagaan/organisasi, keterbatasan kapasitas menyerap hanya binaan yang hanya segmen tertentu UMKM dalam masyarakat, dan keterbatasan kemampuan keuangan. Hampir semua organisasi berbagai model pemberdayaan UMKM secara konsep tidak terancang dengan baik, dan dalam implementasinya juga banyak kelemahan.

Selain itu, kenyataannya hampir

semua organisasi pemberdayaan UMKM yang ada mempunyai modal yang terbatas dan kemampuannya memberikan bantuan menjadi terbatas, apalagi masing-masing jalan sendiri, kurangnya kerja sama dengan pihak terkait lainnya seperti organisasi pemberdayaan lain dan pihak pemerintah. Persoalan yang sangat menonjol dari berbagai pelaksana program pemberdayaan UMKM ini adalah ketergantungan mereka pada sponsor terutama pemerintah. Belum banyak institusi-institusi pemberdayaan ini yang mampu mandiri hidup berkelanjutan tanpa dukungan dari sponsor.

Banyak kendala-kendala yang menjadi hambatan pengelolaan BMT dalam pemberdayaan sektor riil. Kendala-kendala tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal adalah kendala yang disebabkan karena faktor dari dalam BMT itu sendiri. Hal ini nampak pada adanya fakta bahwa banyak dijumpai pengurus atau pengelola BMT belum memahami tentang prinsip-prinsip syariah dan juga prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar. Atau dengan kata lain belum terpenuhinya sumberdaya insani yang mumpuni di bidang ekonomi syariah, sehingga dalam praktiknya BMT seringkali menjadi sama dengan lembaga keuangan konvensional yang jauh dari nilai-nilai Islami.

Adapun kendala eksternal adalah kendala yang disebabkan oleh faktor dari luar BMT, seperti masih adanya budaya masyarakat yang belum sepenuhnya menerima eksistensi lembaga keuangan syariah karena di anggap rumit dan tidak terprediksi. Kendala pada aspek hukum juga masih dijumpai, yakni terkait dengan status hukum BMT yang pada umumnya adalah koperasi. Menurut ketentuan hukum koperasi memerlukan aspek legal lain jika ingin melakukan kegiatan penghimpunan dana. Fungsi BMT yang hampir mirip-mirip dengan bank, yakni sebagai lembaga intermediasi keuangan belum mendapatkan pijakan hukumnya yang kokoh. Adanya kendala dimaksud perlu segera dicarikan jalan keluarnya, agar BMT sebagai lembaga dengan target market sektor riil berupa usaha-usaha kecil dapat menjalankan perannya dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kelemahan utama yang dimiliki usaha kecil cukup bervariasi mulai dari sisi pemasaran, produksi, maupun permodalan, terutama kelemahan yang berhubungan dengan permodalan, adalah kelemahan yang paling menonjol yang dimiliki oleh kebanyakan usaha kecil yaitu pengelolaan dana dan alokasi modal. Rendahnya produktivitas perkembangan yang meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi dengan peningkatan

kualitas UMKM yang memadai khususnya skala usaha mikro. Merupakan masalah yang masih dihadapi yakni rendahnya produktivitas sehingga menimbulkan kesenjangan yang sangat panjang antar pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Demikian pula dengan perkembangan produktivitas per tenaga kerja usaha mikro dan kecil serta usaha menengah belum menunjukkan perkembangan yang berarti kinerja seperti itu berkaitan dengan: (a) rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) UMKM terutama dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; dan (b) rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Peningkatan produktivitas UMKM ini begitu dibutuhkan guna mengatasi ketimpangan antar pelaku, antar golongan pendapatan dan antar daerah, termasuk penanggulangan kemiskinan serta mendorong peningkatan daya saing nasional.

Keterbatasan UMKM kepada sumber daya produktif, khususnya terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar, begitu juga seputar pendanaan, produk jasa lembaga keuangan sebagian besar masih berupa kredit modal kerja, sedangkan untuk kredit investasi sangat terbatas. Bagi UMKM keadaan ini sulit untuk meningkatkan kapasitas usaha ataupun mengembangkan produk-produk

yang bersaing. Disamping persyaratan pinjaman yang cukup sulit misalnya pinjaman yang mengharuskan adanya jaminan sekalipun usahanya layak untuk mendapatkan pinjaman, karena dunia perbankan sendiri yang merupakan akar pendanaan terbesar masih saja menganggap UMKM sebagai kegiatan yang memiliki resiko tinggi.

Penguasaan teknologi, manajemen, informasi dan pasar masih sangat jauh dari memadai dan sangat relatif memerlukan biaya yang besar untuk dikelola secara mandiri oleh UMKM. Sementara ketersediaan lembaga yang menyediakan jasa di bidang teknologi, manajemen, informasi dan pasar juga sangat terbatas dan tidak meratake disetiap daerah. Masyarakat berperan di bidang usaha dalam pelayanan kepada UMKM juga belum berkembang dikarenakan pelayanan terhadap UMKM oleh kebanyakan orang dipandang masih kurang menguntungkan.

E. Analisis Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Proses Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah

Tujuan utama pemberdayaan yang dilakukan BMT Amanah Ummah adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya, maka tidak bisa dipungkiri bahwa peranbaitulmaalwattamwildalampemberda yaan UMKM sangat penting untuk

menunjang percepatan pertumbuhan usaha yang tidak berdaya menjadi berdaya. Pemberdayaan usaha kecil pada hakikatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.¹⁵

Peran bmt selain sebagai sebuah koperasi jasa keuangan syariah selama ini tidak hanya melayani simpan pinjam anggota bmt mempunyai peran yang lebih penting lagi yakni melakukan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan ekonomi syariah yang mencakup nilai kejujuran, nilai keadilan, pemerataan. Peran untuk memberikan edukasi syariah tersebut bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan sebuah proses yang panjang, pengetahuan yang mumpuni dan kemampuan leadership.

Berbicara mengenai syariah tidak hanya berbicara kepada orang lain, tetapi juga berbicara kepada diri sendiri khususnya kepada pengelola bmt. Karena itu, pengelola bmt harus menempatkan diri sebagai seorang dai (*agentofchange*). Di dalam masyarakat konsep luhur bmt yang mampu memadukan antara profit dan social secara simultan telah terbukti menjadi konsep yang ideal dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran dan menekan angka kemiskinan. Logikanya

¹⁵ Gunawan Sumodiningrat M, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hal. 139.

semakin banyak bmt didirikan maka penyerapan tenaga kerja semakin banyak.

Tidak hanya sampai disini, berputarnya dana simpan pinjam di bmt akan semakin memperbanyak sector usaha yang tumbuh di kalangan pelaku usaha mikro, kecil menengah. Ditambah dengan banyaknya anggota atau masyarakat yang juga membayarkan ZIS-nya lewat BMT tidak hanya berperan dalam pengembangan usaha mikro, namun juga telah mampu berperan dalam membantu kaum dhuafa.

Selain sebagai lembaga mediasi, bmt juga harus dapat berperan sebagai pendamping usaha anggotanya, meningkatkan skill dan pengetahuan para anggota (calon anggota) dalam mengelola usahanya agar terus berjalan sesuai dengan perkembangan dan permintaan konsumen yang semakin meningkat, baik dari pelayanan, harga, kualitas produk, performance usaha, dan lain sebagainya.

Pengusaha kecil membutuhkan pendampingan agar mampu bersaing di pasaran. Oleh karena itu, maka peran bmt tidak hanya sebatas pada lembaga pelepas uang semata tetapi juga berperan dalam membantu keberlangsungan usaha para anggota merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanggungjawab bmt.

Dalam perkembangannya bmt sebagai intermediasi bagi UMKM telah

melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan usaha kecil, namun berbagai permasalahan yang dihadapi oleh UMKM juga sedemikian kompleksnya sehingga menghambat pertumbuhan usaha kecil jauh dari apa yang diharapkan. Hal penting yang dapat ditangkap dari deskripsi di atas adalah bahwa peran bmt khususnya BMT AU dapat diminimalkan dengan melakukan pemberdayaan terhadap anggotanya.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan pemberdayaan adalah, membangun kemampuan masyarakat, memberikan ruang gerak bagi masyarakat agar berpartisipasi dan emansipasi dengan jelas memilih serangkaian kegiatan riil yang dapat membantu produktivitas ekonomi mereka untuk memperbaiki taraf kehidupan dari yang baik menjadi lebih baik atau dari yang kurang baik menjadi baik. Dengan mengacu pada Joshi dan Moore maka lembaga yang diharapkan memiliki komitmen moral untuk membantu peningkatan taraf ekonomi rakyat adalah lembaga keuangan yang berbasis syariah islam (BMT)

Upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana tersebut di atas paling tidak harus mencakup tiga sisi, yaitu: Pertama, *enabling* yaitu menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat

berkembang, titik tolaknya adalah pengenalan bahwa seluruh insan manusia, seluruh masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, *empowering*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan

paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Ketiga, *protecting*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan masyarakat kecil, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Dalam rangka ini, sangat perlu adanya peraturan perundangan yang secara jelas dan tegas melindungi golongan yang lemah sangat diperlukan.¹⁶

Bukan hanya itu pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT AU terhadap anggotanya sebagai pelaku usaha kecil harus benar-benar dilakukan secara berkesinambungan guna mendapatkan hasil yang bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga para pelaku industri, pemberdayaan bisa meliputi permodalan bagi para pengusaha kecil yang ada supaya bisa mengembangkan usahanya dan memperbaiki kondisi ekonominya,

16

Dian,
Perencanaan Sosial Negara Berkembang,
(Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1999),
h. 15

memberikan ilmu tentang management industri supaya bisa mengatur usahanya dengan baik khususnya pada pembukuan dari usahanya. Setelah melakukan proses pemberdayaan yang dilakukan bmt Amanah Ummah terhadap anggotanya, hal terserbut bisa dibidang efektif dan dinilai bahwa keberadaan BMT Amanah Ummah benar-benar dirasakan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat.

Dalam menjalankan operasionalnya, UMKM, dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Kendala dan permasalahan antara lain dari aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha, dan kualitas sumber daya manusia pengelolanya. Kendala dan permasalahan usaha kecil dan informal lainnya juga disebabkan karena sulitnya akses terhadap informasi dan sumber daya produktif seperti modal dan teknologi, yang berakibat menjadi terbatasnya kemampuan usaha kecil untuk berkembang. Melihat kendala kemampuan manajemen usaha, dan kualitas sumber daya manusia pengelolanya, pihak terkait yang berwenang dalam hal ini kementerian koperasi dan usaha kecil menengah sering kali mengadakan berbagai kegiatan berupa workshop, seminar ataupun diklat yang diadakan dalam lingkup kecil propinsi dan kabupaten.

Sedangkan untuk kendala

permodalan, usaha mikro dan usaha kecil sudah ada alternatif lain yang cukup menjanjikan yakni dengan adanya baitul maal wat tamwil AU yang merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis.

Bagaimanapun, target atau segmen Lembaga Keuangan Mikro senantiasa bersentuhan dengan masyarakat yang relatif miskin atau berpenghasilan rendah. Dengan adanya pemberdayaan usaha mikro kecil berupa bertambahnya modal bagi pengusaha kecil khususnya anggota BMT AU maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran.

Harapanya adalah pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT AU khususnya anggota sebagai pelaku usaha kecil diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan usaha mikro kecil menengah sebagai bagian terbesar dari seluruh entitas usaha nasional merupakan wujud nyata kehidupan ekonomi rakyat Indonesia.

Dalam hal indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh BMT AU terhadap pelaku usaha kecil menengah adalah ketika masyarakat itu memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun social seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi, dalam kegiatan social, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.¹⁷

Peran BMT AU benar-benar dirasakan keberadaannya di dalam lingkungan masyarakat ketika pelaku usaha benar-benar merasakan mudahnya mendapatkan modal usaha yang diberikan oleh BMT AU di lain sisi juga bisa dilihat dari pertumbuhan anggota sebagaimana yang telah digambarkan dalam tabel sebelumnya, bahwa dari tahun ketahun pertumbuhan anggota terus meningkat begitu juga dengan hasil usaha para anggotanya yang terus meningkat.

Dilihat dari pertumbuhan tersebut pengembangan UMKM harus menjadi salah satu strategi utama pembangunan nasional yang pelaksanaannya diwujudkan secara sungguh-sungguh dengan komitmen

bersama yang kuat serta di dukung oleh upaya-upaya sistematis dan konseptual secara konsisten dan terus-menerus dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat di tingkat nasional, regional, maupun lokal). Barang tentu hal ini juga harus dibarengi dengan strategi pengembangan usaha besar dalam kerangka sistem ekonomi kerakyatan.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Perekonomian rakyat yang digambarkan oleh bung hatta yang disebut sebagai bapak perekonomian rakyat, mengacu pada pasal 33 UUD 1945 yang mencantumkan tujuan akhir sistem kemakmuran rakyat secara maksimal, bung hatta merumuskan bahwa perekonomian harus disusun berdasar demokrasi, ekonomi yang mengutamakan kemakmuran. Sehingga ayat 1 pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi;

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan”. Sejalan dengan rumusan ekonomi bung hatta, perkataan “usaha bersama atas dasar kekeluargaan” dimaksudkan untuk pengertian ekonomi kekeluargaan atau ekonomi kerakyatan.¹⁸

Dalam konteks yang paling sederhana permasalahan yang ada bahwa

¹⁷ Achmad Subianto, Ringkasan Dan Bagaimana Membayar Zakat, (Yayasan bermula darikanan: Jakarta, 2004), h. 40

¹⁸ Revrisond Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, (Pustaka Pelajar, 2010), hal. 30. (Yogyakarta,

ekonomi rakyat adalah strategi “bertahan hidup” yang dikembangkan oleh penduduk/rakyat kecil baik di desa maupun di kota. Di samping itu perekonomian rakyat dapat di pahami sebagai aktivitas ekonomi yang seluruh proses kegiatannya diselenggarakan oleh rakyat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan.

Bagaimanapun ekonomi rakyat adalah strategi berorganisasi ekonomi bagi rakyat (lapis bawah) yang tidak selalu menargetkan keuntungan dalam setiap kegiatannya, namun yang pokok adalah pemenuhan kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya. Di dalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif, konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat, dengan strategi pokok memberi kekuatan (*power*) kepada masyarakat. Masyarakat yang lebih memahami kebutuhan dan permasalahannya, harus diberdayakan agar mereka lebih mampu mengenali kebutuhan-kebutuhannya, merumuskan rencana-rencana serta melaksanakan pembangunan secara mandiri dan swadaya.

Partisipasi warga masyarakat

dalam melaksanakan gerakan pembangunan tersebut selalu ditumbuhkan, didorong dan dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Jiwa partisipasi warga masyarakat tersebut adalah semangat solidaritas sosial, yaitu hubungan sosial yang selalu didasarkan pada perasaan moral bersama, kepercayaan bersama dan cita-cita bersama. Oleh karena itu, seluruh warga masyarakat harus selalu bekerja bahu-membahu, saling membantu dan mempunyai komitmen modal dan sosial yang tinggi.

Dari uraian sebelumnya, tampak jelas peran BMT AU di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sedang menghadapi problema ekonomi. Melalui pemberdayaan mampu membantu dan memberdayakan anggotanya sebagai pelaku usaha. Di samping bermanfaat dalam memberdayakan ekonomi umat, BMT AU juga dapat menjadi jembatan pemutus kesenjangan antara si kaya dan si miskin, antara mereka yang berekonomi kuat dengan mereka yang berekonomi lemah. Bukankah demikian sebenarnya keinginan ajaran agama terhadap harta kita “hendaknya harta tidak hanya berputar (dimiliki) pada orang yang kaya saja”.

Di BMT AU, orang kaya dapat menyimpan uangnya melalui produk tabungan mudhrabah maupun produk tabungan lainnya, sementara si miskin

melalui produk pembiayaan dapat mengakses modal untuk usaha ekonomi maupun mengembangkannya. Dengan BMT kegiatan ekonomi akan berputar dengan baik, kesejahteraan tercipta, kesenjangan dan ketimpangan semakin lama semakin mengecil. Akhirnya, keberadaan BMT AU perlu dijadikan pilot project bagi pemberdayaan ekonomi umat. Selanjutnya keberhasilan ini diseminasi dan dikembangkan untuk BMT yang lain dengan corak, karakter dan model tersendiri.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa salah satu yang bisa dilakukan adalah menjadikan bmt sebagai basis pemberdayaan ekonomi umat di tengah-tengah arus modernisasi dan persaingan yang sangat tinggi. Dengan melihat perkembangan bmt dari tahun ke tahun yang sangat besar dan potensial diharapkan persoalan-persoalan ekonomi yang melanda negeri ini dapat diatasi, dan bangsa ini bisa bangkit kembali bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang selangkah lebih maju dari Negara ini.

F. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Kehadiran BMT di tengah-tengah masyarakat berperan aktif dalam

memberdayakan masyarakat miskin atau dengan kata lain masyarakat yang tidak berdaya, pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan (*empowerment*) atau pembangunan (*development*). Pemberdayaan UMKM yang digagas oleh BMT Amanah Ummah merupakan strategi dalam paradigma pembangunan yang bertumpu pada rakyat (*peoplecentreddevelopment*). Untuk bisa lebih aktif dalam mengembangkan potensi diri, dan memperbaiki perekonomian keluarga. Dengan adanya program Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh BMT, masyarakat bisa lebih berperan aktif dalam menjalankan serta mengembangkan usaha mereka masing-masing. Sehingga Usaha Kecil dan Kecil Menengah (UMKM) dapat berjalan optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh para pelaku usahabaik dari Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam penjelasan sebelumnya telah dijelaskan beberapa hal yang sering dihadapi oleh BMT Amanah Ummah dalam melakukan pemberdayaan UMKM diantaranya adalah kendala-kendala internal dan eksternal, adapun kendala internal kurangnya pemahaman anggota tentang BMT, adapun factor-faktor eksternal adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan syariah atau BMT sehingga hal ini

memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap banyak sedikitnya

anggota BMT.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aziz, Amin, *“Pedoman Pengelolaan BMT”*, (Jakarta: PINBUK, 2004).
- Dian, *Perencanaan Sosial Negara Berkembang*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1999).
- Bungin, B. (2005). *Data Penelitian Kuantitatif*. PT Raja Grafindo. Jakarta, 2005.
- Baswir, Revrison, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010).
- Bhakti, R. (2016). *Pemberdayaan Umkm Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah*. Arena Hukum.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. In Jakarta: Kencana.
- Dwiwinarno, T., Kusnadi, A., & Andari, E. (2011). *Studi Kelayakan Bisnis Air Minum Dalam Kemasan Pdam Kabupaten Kulonprogo*. Efektif Jurnal Bisnis Dan Ekonomi.
- Danupranata, Gita, *Ekonomi Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: UPFE-UMY, 2006).
- Dwyer, S. (2005). *The role of the social worker*. Psychiatry.
- Effendi, Rustam, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, 2003), Cet I.
- Haryati, S., Sharifah Meryam, S, M., & Zakila, A, R. (2009). *Pembangunan Modal Insan Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup Masyarakat Haryati*. International Conference on Human Capital Development (ICONHCD 2009).
- Iffah, N. G., & Hadi, D. F. (2019). *Pemberdayaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) melalui Interbank network sebagai solusi optimasi perekonomian nasional*. Journal of Business & Banking.
- Mubyarto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial*, (Yogyakarta, Aditya Media, 1995).
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- M Amirin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990).
- Rifa’I, Bachtiar, *Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)Krupuklkan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 1, Nomor 1, Januari 2013.
- Sumawinata, *Sarbini, Politik Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Ramdhansyah, *Pengembangan Model Pendanaan Umkm Berdasarkan Persepsi Umkm*, Jurnal Keuangan dan Bisni, Vol. 5, No. 1, Maret 2013.
- Ridwan, Muhammad, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*, Cet. I (Yogyakarta: Citra Media, 2006).

- Prasetyo, P., & Maisaroh, S. (2014). *Model strategi pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai upaya pengentasan kemiskinan*. Trikonomika Journal.
- Prasetya, R. A., & Herianingrum, S. (2016). PERANAN BAITUL MAAL WA TAMWIL MENINGKATKAN USAHA MIKRO MELALUI PEMBIAYAAN MUDHARABAH. JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM. <https://doi.org/10.30997/jsei.v2i2.286>
- Prasetyo, P., & Maisaroh, S. (2014). Model strategi pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Trikonomika Journal.
- Prastiawati, F., & Satya Darma, E. (2017). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. Jurnal Akuntansi Dan Investasi.
- Raudino, S., & Raudino, S. (2016). *The Theory of Economic Development. In Development Aid and Sustainable Economic Growth in Africa*.
- Rofiah, K. (2011). *Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo*. Kodifikasia.
- Raudino, S., & Raudino, S. (2016). The Theory of Economic Development. In Development Aid and Sustainable Economic Growth in Africa.
- Rofiah, K. (2011). Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo. Kodifikasia.
- Rofiah, K. (2011). Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo.
- Sumodiningrat M, Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.
- Subianto, Achmad, *Ringkasan Dan Bagaimana Membayar Zakat*, (Yayasan bermula darikanaan: Jakarta, 2004).
- Santoso, D. (2013). KEWIRAUSAHAAN. Kewirausahaan.
- Wiryanto, Wisber, *Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Banjarbaru Dalam Rangka Millenium Development goals 2015, Makalah (sub tema MDGs dan Pemberdayaan SME) dalam rangka Seminar Nasional Demokrasi dan Masyarakat Madani*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka pada 13 Juli 2012.
- Y. Sri Susilo, Edy Suandi Hamid, *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni 2011.